

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA
PEMALSUAN SURAT TERHADAP SYARAT PERMOHONAN IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) STUDI KASUS DI POLRESTA
PADANG**

(Yori Mukhsis, 16150021, Prodi Ilmu Hukum, 2022, 61 Halaman)

Pembimbing: Drs. Susi Delmiati, S.H., M.H. dan Sry Wahyuni, S.H., M.H.

ABSTRAK

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada alinea ke empat menjelaskan bahwa salah satu fungsi Negara adalah untuk mensejahterakan rakyatnya. Salah satu kasus terkait dengan tindak pidana pemalsuan surat yang banyak terjadi di wilayah hukum kota Padang sebagaimana yang hendak diteliti, yakni terjadinya tindak pidana mempergunakan Surat Palsu dalam melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan Keputusan Walikota Padang Nomor: 0573/IMB/UD/LT.1/PB.08/2017, tanggal 24 Agustus 2017. Permasalahan yang menjadi objek penelitian diantaranya: (1) Bagaimanakah proses penyidikan yang dilakukan oleh seorang penyidik dalam tindak pidana mempergunakan surat palsu dalam melakukan pengurusan surat izin mendirikan bangunan (2) Bagaimanakah kendala atau hambatan apa yang ditemukan oleh seorang penyidik dalam menangani masalah yang ada di tindak pidana mempergunakan surat palsu dalam melakukan pengurusan surat izin mendirikan bangunan di Polresta Padang? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis ataupun empiris, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Proses Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Seorang Penyidik Dalam Tindak Pidana Mempergunakan Surat Palsu Dalam Melakukan Pengurusan Surat Izin Mendirikan Bangunan atas nama Alber Dianto, S.H., M. Kn telah memenuhi seluruh unsur dalam KUHP. Kendala atau hambatan yang ditemukan ialah waktu yang digunakan untuk proses penyidikan yang begitu lama dan Sulit mengumpulkan alat bukti berupa saksi dan surat. Penyidik yang menyidik kasus ini harus dapat memanfaatkan dan memaksimalkan waktu penyidikan seoptimal mungkin. Penyidik yang menyidik kasus ini harus mampu mengelola dan mengorganisir alat bukti.

Kata kunci: Tindak Pidana, Pemalsuan, IMB

ABSTRACT

The opening of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in the fourth paragraph explains that one of the functions of the State is to prosper its people. The state is required to be active in achieving these goals by prioritizing common interests rather than individual or group interests. One of the cases related to the criminal acts of counterfeiting letters that often occurs in the jurisdiction of the city of Padang as to be investigated, namely the occurrence of the crime of using counterfeit letters in managing building permits in accordance with the Mayor of Padang Decree Number: 0573/IMB/UD/LT. 1/PB.08/2017, 24 August 2017. The problems that become the object of this research include: (1) How is the investigation process carried out by an investigator in a crime using a Palus letter in administering a building permit (2) What are the obstacles or obstacles found by an investigator in dealing with problems in the building? Is it a crime to use a forged document in managing a building permit at the Padang Police? The method used in this research is a sociological or empirical juridical approach, the type of data used is primary data and secondary data. The Investigation Process Conducted by an Investigator in the Crime of Using Fake Letters in Managing Building Construction Permits in the name of Alber Dianto, S.H., M. Kn has fulfilled all elements in the Criminal Procedure Code. The obstacles or obstacles found were the time used for the investigation process which was so long and difficult to collect evidence in the form of witnesses and letters. Investigators who are investigating this case must be able to utilize and maximize the investigation time as optimally as possible. The investigator who investigated this case must be able to manage and organize the evidence.

Keywords: *Crime, Counterfeiting, IMB*